



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN II**

**TAHUN 2025**

**KECAMATAN NUHA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Nuha ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan selama periode triwulan yang bersangkutan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program, serta kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tercapainya visi serta misi pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, baik dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, maupun seluruh staf kecamatan Nuha yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Nuha serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sorowako, Juli 2025

Camat Nuha,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.**

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....	4
2.1. KONDISI GEOGRAFIS .....	4
2.2. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	6
2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	9
2.5. ISU STRATEGIS.....	13
2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	14
<b>BAB II</b> .....	17
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	17
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	17
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	17
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	19
2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	21
2.2. PERJANJIAN KINERJA .....	22
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	23
<b>BAB III</b> .....	24
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	28
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir .....	29

C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	31
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional.....	33
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
G.	Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	49
3.2.	REALISASI ANGGARAN .....	53
BAB IV	.....	57
PENUTUP	.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### **2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

#### **2.1. KONDISI GEOGRAFIS**

Kecamatan Nuha merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah 859,71 Km<sup>2</sup> atau 12,74% Luasan tersebut membawa kecamatan Nuha sebagai kecamatan terluas kelima dari sebelas kecamatan yang ada di Luwu Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Towuti.. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 (Empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu:

1. Desa Matano
2. Desa Sorowako

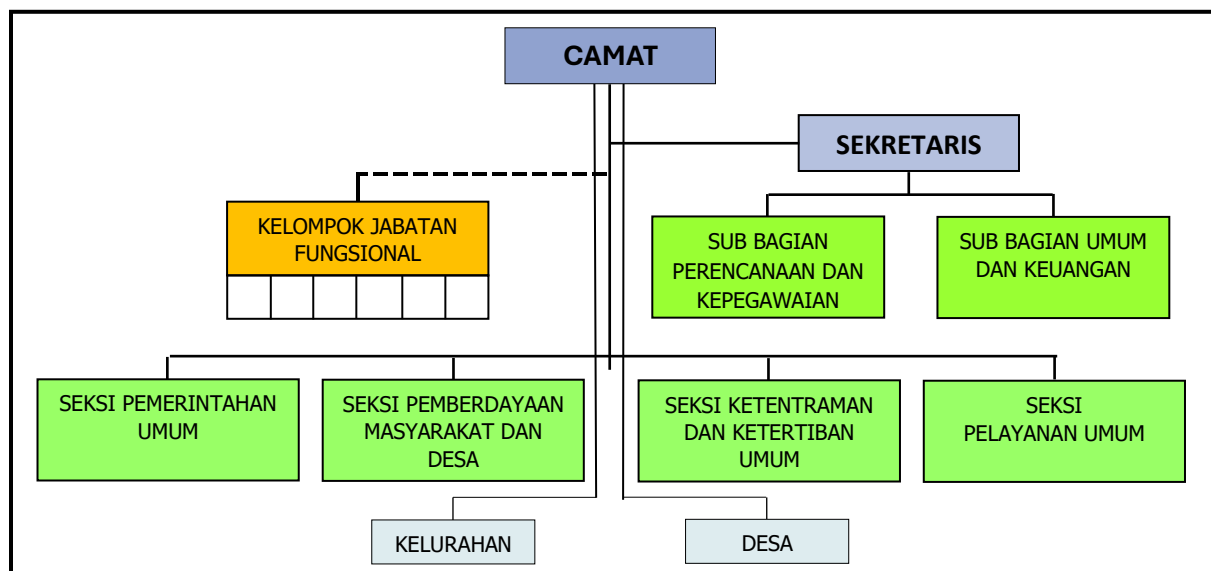
2. Desa Nuha
3. Desa Nikkel
4. Kelurahan Magani

## 2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kecamatan Nuha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Nuha



## 2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

## **2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;



- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pemerintahan Umum**

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **2.4.1. Aspek Eksternal**

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:  
Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.
2. Kondisi Sosial dan Budaya:

Penduduk Kecamatan Nuha terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.

3. Stabilitas Keamanan:

Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Nuha untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.

4. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.

#### **2.4.2. Aspek Internal**

Aspek internal yang mendukung terbagi atas 3 komponen yaitu:

##### **1. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Dalam memberikan pelayanan publik, Kecamatan Nuha pada tahun 2024 didukung oleh 12 orang PNS yang terdiri dari:

- a. Eselon III/A sebanyak 1 orang
- b. Eselon III/B sebanyak 1 orang
- c. Eselon IV/A sebanyak 3 orang
- d. Eselon IV/B sebanyak 2 orang
- e. Pelaksana sebanyak 6 orang

selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS, Kantor Kecamatan Nuha juga didukung oleh 6 orang tenaga upah jasa.

Berikut data PNS dan upah jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025:

##### **A. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.**

**Tabel I.1.**

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Golongan IV	1		1										2	
2	Golongan III		2		5		2								9
3	Golongan II							1	2					1	2
<b>JUMLAH</b>														<b>3</b>	<b>11</b>

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Kecamatan Nuha sebanyak 13 orang, tenaga upah jasa 13 yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Nuha sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

**B. Jumlah pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.**

Komposisi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2.**

Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	ESELON	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/A	1												1	0
2	III/B			1										1	0
3	IV/A				6										6
4	IV/B			2										2	0
<b>JUMLAH</b>														<b>5</b>	<b>2</b>

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang yang didominasi oleh Laki-Laki sebanyak 5 (Lima) orang, dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang.

Berikut gambaran dalam bentuk grafik jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025:

### C. Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Jumlah Tenaga Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.3.**

Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Sukarela berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	TENAGA UPAH JASA DAN SUKARELA	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tenaga Upah Jasa				1				1		1				3
<b>JUMLAH</b>															<b>3</b>

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I.4.**

Sarana dan Prasarana Pendukung  
Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
----	--------	--------	------------

	<b>Kecamatan :</b>		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
4.	Tanah Bangunan Rujab	7,574 M2	Baik
5.	Tanah Bangunan E-KTP	1,559M2	Baik
6	Mobil	1 unit	Baik
7.	Sepeda motor	2 unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

### 3. Sumber Daya Anggaran:

Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

**Tabel I.5.**

Sumber Daya Anggaran

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.3.932.951.208
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.766.498.802
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.166.452.406
<b>5.2</b>	BELANJA MODAL	Rp.10.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Nuha T.A 2025

## 2.5. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Nuha dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat

sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Nuha tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Nuha yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

## **2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Nuha tahun 2025 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran:**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis pada laporan evaluasi kecamatan merupakan panduan utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana ini mencakup penetapan visi, misi, serta tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi lokal. Strategi yang disusun meliputi pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kolaborasi antarinstansi dan partisipasi warga. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dengan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan kecamatan secara menyeluruh.

Dengan renstra memastikan bahwa sumberdaya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Nuha bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab.

Penyusunan renstra Kecamatan Nuha mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, renstra Kecamatan Nuha dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

##### **2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

###### **A. VISI**

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah dan sesuai dengan cita-cita yang ingin

diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 maka visi Kabupaten Luwu Timur yang ingin diwujudkan adalah :

**“ Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

- **“Sejahtera”** mengandung makna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kegembiraan membaca dan literasi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan, mendukung pengembangan rumah sakit dan layanan kesehatan, mengutamakan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan umat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi pengamalan nilai dan norma agama dan melestarikan budaya daerah.
- **“maju”** Mengandung makna upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi pertumbuhan yang sejalan antar sektor guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemanfaatan koordinasi dan keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah; selain itu misi juga mencakup peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan serta memperkuat koperasi dan UMKN, peningkatan daya saing pariwisata, penguatan sistem penyuluhan, pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan pangan promosi

peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas, mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah, mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi .

## **B. MISI**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur, maka diupayakan melalui 5 (Lima) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.

Misi RPJMD yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”**, Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan dan sasaran strategis kecamatan disusun sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan

kepada masyarakat di tingkat wilayah. Tujuan strategis berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan warga. Sementara itu, sasaran strategis diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan, serta terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya saing. Melalui tujuan dan sasaran ini, kecamatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayahnya.

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah dapat diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun:

Tujuan dan sasaran Kecamatan Nuha 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Strategis

<b>VISI RPJMD:</b> Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya		
<b>MISI 4:</b> Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik		
<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

### 2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat kecamatan merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja pemerintahan di wilayah tersebut. IKU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui pengukuran yang terarah dan terukur, kecamatan dapat mengevaluasi efektivitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur. Dengan demikian, IKU menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana tujuan dan sasaran memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

**Tabel 2.2.**  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada pemerintah kecamatan merupakan dokumen formal yang berisi komitmen antara camat sebagai pimpinan unit kerja dengan pihak yang lebih tinggi, seperti bupati atau wali kota, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perjanjian kinerja, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada mas

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuha Tahun 2025:

**Tabel 2.3.**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05

<b>2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	66
----------	---	-------------	----

### 2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) Program dengan anggaran sebesar **Rp.3.943.251.208,-** dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**

Program pada RKA Perubahan Tahun 2025.

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3.943.251.208</b>
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	4.754.850
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>279.571.950</b>
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>13.080.850</b>
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>32.623.000</b>
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>8.211.350</b>

Sumber: RKA Kecamatan Nuha Tahun 2025



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

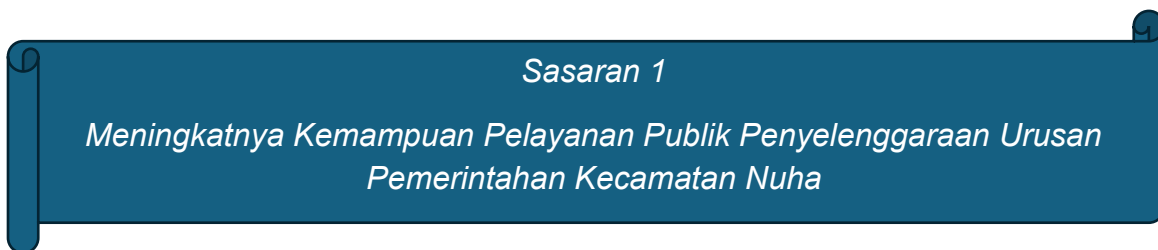
Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Nuha pada periode ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.1**

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Nuha Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	80,85	99,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	66	64,15	97,19

Berikut akan dijabarkan secara rinci hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis :



Definisi operasional dari sasaran ini mengacu pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparaturnya kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur melalui **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Meningkatnya kemampuan pelayanan publik berarti adanya perbaikan dalam aspek kompetensi aparatur, efektivitas proses pelayanan, serta kualitas hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari naiknya nilai IKM yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Pengukuran (berdasarkan IKM):

1. Kualitas Pelayanan: Ketepatan, kejelasan, dan kemudahan prosedur pelayanan publik.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kompetensi dan Sikap Petugas: Kemampuan, keramahan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat.
4. Keadilan dan Kepastian Layanan: Kesetaraan dalam pemberian layanan tanpa diskriminasi.
5. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan yang memadai dan nyaman.

Cara Pengukuran:

Peningkatan kemampuan pelayanan publik diukur melalui perbandingan nilai IKM dari periode sebelumnya dengan periode berjalan. Kenaikan nilai IKM menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$X = Y \text{ dibagi Nilai Dasar; dimana}$ $X = \text{nilai indeks}$ $Y = \text{nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi}$

	<p>Nilai Dasar = 25</p> <p>Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik</li> <li>- Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik</li> <li>- Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik</li> <li>- Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik</li> </ul>
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha
OPD	Kecamatan Nuha
Penanggungjawab	

Dengan demikian, peningkatan kemampuan pelayanan publik dapat dinyatakan terjadi apabila nilai IKM mengalami kenaikan dan berada pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

## Sasaran 2

### *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan*

Defenisi operasional dari sasaran ini adalah kondisi di mana organisasi atau instansi publik menunjukkan peningkatan dalam tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian hasil kerja. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tercermin dari perbaikan sistem pelaporan, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam pencapaian hasil dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Nama Indikator	<b>Nilai AKIP</b>
Interpretasi	sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	

	<p> <math>\text{Nilai AKIP} = (0,10 \times \text{nilai perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{nilai Evaluasi Kinerja}) + (0,55 \times \text{Nilai capaian Kinerja})</math> </p> <p>-</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.</li> <li>- Memuaskan (A) (80-&lt;90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien</li> <li>- Baik (BB) (70-&lt;80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.</li> <li>- Cukup Baik (B) (60-&lt;70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil</li> <li>- Kurang Baik (CC) (50-&lt;60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil</li> <li>- Buruk (D) (&lt;50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil</li> </ul>
Sumber Data	Inspektorat Kab. Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama dapat) dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikato Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW II	CAPAIAN PREDIKAT	
Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,02	80,85	99,79	Baik

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Akip	66	64,15	97,19	Baik
---	------------	----	-------	-------	------

Sumber: Kecamatan Nuha Tahun 2025

Pada Tahun 2025, kinerja Kecamatan Nuha menunjukkan capaian yang cukup baik berdasarkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis peningkatan kemampuan pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menetapkan target sebesar **81,02**, dengan realisasi pada Triwulan II mencapai **80,85** atau **99,79%** dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kategori **“Baik”**, meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar target dapat terlampaui pada periode berikutnya.

Sementara itu, pada sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, nilai **AKIP** tahun 2025 menargetkan angka **66**, dengan realisasi hingga Triwulan II sebesar **64,15**, atau setara **97,19%** dari target. Predikat **“Baik”** tetap dapat dipertahankan, mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan telah berjalan dengan cukup efektif. Secara keseluruhan, kedua indikator menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha berada pada tren kinerja yang positif, meskipun penguatan upaya perbaikan tetap diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal pada akhir tahun.

## B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir

**Tabel 3.3**

**Perbandingan realisasi kinerja Tahun Ini dengan tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan	2021 (TW II)	80,03	99,9%	BAIK

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	5	6	7
	Masyarakat (IKM)	2022 (TW II)	80,05	98,83%	BAIK
		2023 (TW II)	80,62	98,92%	BAIK
		2024 (TW II)	81,02	99,96%	BAIK
		2025 (TW II)	81,05	99,79%	BAIK
2	Nilai Akip	2021 (TW II)	64,54	102,4%	B
		2022 (TW II)	58,40	91,25%	CC
		2023 (TW II)	62,50	96,16%	B
		2024 (TW II)	64,70	98,04%	B
		2025 (TW II)	64,15	97,19%	B

Sumber : Kecamatan Nuha 2025

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Nuha dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif stabil pada kedua indikator utama. Pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kinerja pelayanan publik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Realisasi IKM pada tahun 2021 sebesar **80,03**, kemudian meningkat menjadi **80,05** pada tahun 2022, **80,62** pada tahun 2023, dan **81,02** pada tahun 2024. Pada tahun 2025, capaian IKM kembali naik menjadi **81,05** dengan persentase capaian **99,79%**, mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik terus mengalami perbaikan dan mampu mempertahankan predikat baik dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan setiap tahun, konsistensi

peningkatan ini menandakan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, kinerja pada indikator **Nilai AKIP** menunjukkan fluktuasi yang lebih beragam dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat capaian **64,54** dengan persentase capaian **102,4%**, menjadi titik capaian tertinggi dalam periode tersebut. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi **58,40** atau **91,25%**, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar **62,50** dan **64,70** pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai AKIP sedikit menurun menjadi **64,15**, dengan capaian **97,19%**. Meskipun mengalami fluktuasi, kinerja akuntabilitas Kecamatan Nuha tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan kemampuan untuk melakukan perbaikan setelah mengalami penurunan. Secara keseluruhan, kedua indikator menggambarkan bahwa kinerja Kecamatan Nuha berada pada arah yang positif, dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang stabil dan akuntabilitas kinerja yang terus dijaga melalui upaya perbaikan dari tahun ke tahun.

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tw II	Target Renstra
1	2	3	4	5	6



<b>1</b>	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,02	80,85	81,50
<b>2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Akip	66	64,15	67

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Kecamatan Nuha 2021–2026 menunjukkan bahwa kedua indikator utama masih berada sedikit di bawah sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Pada sasaran peningkatan kemampuan pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 menargetkan nilai **81,02**, dengan realisasi Triwulan II sebesar **80,85**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu **81,50**, capaian tahun 2025 berada pada posisi mendekati target namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai standar pelayanan publik yang diharapkan pada akhir periode perencanaan. Meskipun demikian, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada tingkat yang baik dan berpotensi mencapai target Renstra apabila upaya perbaikan terus dilakukan secara konsisten.

Pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, nilai **AKIP** tahun 2025 juga menunjukkan pola yang serupa. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **66**, dengan realisasi Triwulan II mencapai **64,15**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar **67**, capaian tersebut masih berada sedikit di bawah standar yang diharapkan. Namun, nilai tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha telah berada pada jalur yang relatif baik dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan. Untuk mencapai target Renstra pada tahun 2026, diperlukan penguatan

pengendalian internal serta peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menggambarkan kinerja yang cukup baik dan berada dekat dengan target akhir Renstra, dengan peluang peningkatan yang masih terbuka lebar pada tahun berikutnya.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, analisis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana pelayanan pemerintah memenuhi harapan warga. Perbandingan IKM antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi kecamatan dengan kinerja pelayanan terbaik serta wilayah yang memerlukan peningkatan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Berikut tabel perbandingan IKM dengan Kecamatan yang ada dalam wilayah Kab. Luwu Timur:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan realisasi regional**

No	Indikator Kinerja	Kecamatan	Realisasi TW II
1	2	3	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NUHA	80,85
		TOWUTI	84,33
		WASUPONDA	94,07
2	Nilai AKIP	NUHA	64,15
	(berdasarkan LHE tw I)	TOWUTI	65,45
		WASUPONDA	57,90

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja Triwulan II pada tiga kecamatan — Nuha, Towuti, dan Wasuponda — dapat dijelaskan kondisi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Kecamatan Wasuponda menunjukkan capaian tertinggi dengan nilai 94,07, yang menandakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di wilayah tersebut sangat baik.
- Kecamatan Towuti memperoleh nilai 84,33, yang juga tergolong baik dan menunjukkan pelayanan publik berjalan efektif meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas.
- Kecamatan Nuha mencatat nilai 80,85, yang masih berada pada kategori baik, namun relatif lebih rendah dibanding dua kecamatan lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara umum, capaian IKM di ketiga kecamatan menunjukkan tren positif dengan seluruh nilai berada di atas 80, yang berarti pelayanan publik telah memenuhi standar kepuasan masyarakat.

2. Nilai AKIP (berdasarkan LHE Triwulan I)

- Kecamatan Towuti memiliki nilai tertinggi yaitu 65,45, menunjukkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Kecamatan Nuha memperoleh nilai 64,15, sedikit di bawah Towuti, yang menandakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan namun masih perlu penguatan dalam evaluasi dan tindak lanjut hasil kinerja.
- Kecamatan Wasuponda mencatat nilai 57,90, yang relatif lebih rendah dibanding dua kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan kinerja, terutama pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan.

Jika dibandingkan secara regional, terlihat bahwa Towuti memiliki keseimbangan antara kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang baik, sedangkan Wasuponda, meskipun memiliki IKM tertinggi, masih perlu memperkuat sistem akuntabilitasnya agar kinerja pelayanan publik dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan nilai akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sinergi antara kualitas pelayanan publik dan penguatan sistem manajemen kinerja di setiap kecamatan agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkesinambungan.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

##### **Faktor Kegagalan / Hambatan**

##### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
- Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

## **2. Nilai AKIP**

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih baik  
Dokumen seperti PK, Renja, dan LKjIP semakin terstruktur dan sesuai pedoman.
- Pendampingan dari Inspektorat/SKPD terkait  
Supervisi rutin membantu memperbaiki kelemahan dalam manajemen kinerja.
- Komitmen pimpinan dalam mengawal implementasi kinerja  
Arahan dan kontrol pimpinan memastikan setiap kegiatan mengacu pada target kinerja.

## **Faktor Kegagalan / Hambatan**

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- Jumlah SDM belum sebanding dengan volume layanan  
Beban kerja tinggi tidak diimbangi personel yang cukup, mempengaruhi kecepatan pelayanan.
- Sarana prasarana pelayanan masih terbatas  
Fasilitas seperti ruang layanan dan perangkat IT belum memadai untuk mendukung kelancaran layanan.
- Kompetensi pegawai tidak merata  
Masih terdapat aparatur yang membutuhkan peningkatan keterampilan pelayanan publik.
- Pemanfaatan layanan digital belum optimal  
Masyarakat belum sepenuhnya paham atau terbiasa menggunakan layanan online sehingga terjadi antrian manual.

## **2. Nilai AKIP**

- Pemahaman aparat terhadap SAKIP belum merata  
Beberapa pegawai masih kesulitan dalam menyusun indikator, cascading, maupun pelaporan.
- Dokumentasi bukti dukung belum tertata baik  
Arsip kegiatan belum terdokumentasi dengan rapi sehingga mengurangi kualitas penilaian kinerja.
- Penyesuaian terhadap perubahan dokumen perencanaan strategis terbaru sering menuntut adaptasi yang tidak bisa dilakukan secara cepat.

## **Solusi Alternatif**

### **1. Untuk Meningkatkan IKM**

- Pelatihan layanan publik bagi aparatur  
Meningkatkan kemampuan komunikasi, keramahan, dan manajemen pelayanan.
- Optimalisasi layanan digital dan help desk  
Memperbaiki sistem online sekaligus menyediakan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan.
- Penambahan fasilitas pelayanan dan infrastruktur IT  
Pembaruan perangkat, peningkatan jaringan, dan perbaikan ruang layanan untuk kenyamanan pengguna.
- Penguatan sistem reward & punishment  
Memberikan motivasi kepada pegawai berkinerja baik dan meningkatkan disiplin bagi yang belum memenuhi standar.
- Sosialisasi layanan kepada masyarakat  
Menyediakan informasi yang jelas mengenai alur dan persyaratan sehingga mengurangi kebingungan publik.

### **2. Untuk Meningkatkan Nilai AKIP**

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya pada tingkat kecamatan merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan wilayah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia dan keuangan, serta infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan public

#### **1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha (S1)**

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan anggaran**

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	8.095.000	4.754.850	50%	1,393,700	100 %	29.3%
1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	8.095.000	4.754.850	50 %	1,393,700	100 %	29.3%
1.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	8.095,000	4.754.850	12 Dokumen	1,393,700	100 %	29.3%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	297.275.450	279.571.950	100 %	44,073,050	100 %	15.8%
2.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97.275.450	79.571.950	100 %	21,513,050	75 %	27.0%
2.1.1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	17.807.850	16.030.050	5 Lembaga Kemasyarakatan	15,263,050	100 %	95.2%
2.1.2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	4	79.467.600	63.541.900	8 Laporan	6,250,000	50 %	9.8%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
	masyarakat di wilayah kecamatan							
2.2.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	200.000.000	200,000,000	50%	22,560,000	50%	11.3%
2.1.1.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	2 Lembaga Kemasyar akatan	200.000.000	200.000.000	1 Lembaga Kemasyar akatan	22,560,000	50 %	11.3%
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	16.079.500	13.080.850	50 %	2,215,850	100 %	16.9%
3.1.	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	11.889.700	9.525.400	50%	1,775,400	50 %	18.6%
3.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.724.150	6.774.900	2 Laporan	1,124,900	50 %	16.6%
3.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4.165.550	2.750.500	2 Laporan	650,500	50 %	23.7%
3.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	4.189.800	3.555.450	100 %	440,450	50 %	12.4%



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
3.2.1.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	4 Laporan	4.189.800	3.555.450	2 Laporan	440,450	50 %	12.4%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	35.263.050	32.623.000	50 %	7,372,300	50 %	22.6%
4.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	35.263.050	32.623.000	50 %	7,372,300	50 %	22.6%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	35.263.050	32.623.000	6 Laporan	7,372,300	50%	22.6%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	10.333.200	8.211.350	50 %	-	50 %	0.0%
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.333.200	8.211.350	50 %	-	50 %	0.0%
5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Laporan	3.044.500	2.787.150	6 Laporan	-	50 %	0.0%
5.1.2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan	12 Laporan	7.288.700	5.424.200	6 Laporan	-	50%	0.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
	perdesaan di wilayah kecamatan							

#### Uraian Penjelasan Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja (Sasaran I)

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian **Sasaran I: Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Kecamatan Nuha**, menunjukkan adanya variasi capaian kinerja dan tingkat efisiensi anggaran di berbagai unit kegiatan. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar kegiatan mengalami penyesuaian anggaran melalui efisiensi, yang berdampak pada penurunan nilai anggaran akhir dibandingkan pagu awal.

Pada **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, capaian kinerja mencapai **100%**, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar **29,3%** dari anggaran setelah efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mampu terlaksana secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif kecil. Sub kegiatan pelayanan perizinan non usaha juga menunjukkan efisiensi yang sama, dengan kinerja 12 dokumen sesuai target serta realisasi anggaran 29,3%.

Pada **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, capaian kinerja mencapai **100%**, namun realisasi anggaran bervariasi antar kegiatan. Kegiatan koordinasi pemberdayaan desa mencapai realisasi kinerja penuh, tetapi realisasi anggaran hanya **27,0%**, mengindikasikan efisiensi yang cukup besar. Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat bahkan menunjukkan efisiensi sangat tinggi dengan realisasi anggaran **95,2%**, sementara capaian kinerjanya melampaui target (5 lembaga). Sebaliknya, sub kegiatan peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat hanya mencapai **50%** capaian kinerja, dengan realisasi anggaran yang sangat rendah (**9,8%**), menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk **Pemberdayaan Kelurahan**, capaian kinerja hanya **50%**, yaitu 1 lembaga dari target 2, serta realisasi anggaran sebesar **11,3%**. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan belum berjalan optimal dan memerlukan evaluasi mendalam.

Pada **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, capaian kinerja menunjukkan hasil beragam. Beberapa sub kegiatan, seperti sinergitas dengan TNI/Polri dan harmonisasi tokoh masyarakat, hanya mencapai **50%** kinerja dengan realisasi anggaran di bawah 25%. Meskipun demikian, koordinasi penegakan Perda tetap mencapai target **100%**, meskipun realisasi anggarannya hanya **12,4%**.

**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** mencapai **50%** kinerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas Forkopimcam, dengan penggunaan anggaran sebesar **22,6%** dari anggaran setelah efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kegiatan yang dapat dilaksanakan hingga pertengahan tahun.

Sementara itu, **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** menunjukkan capaian kinerja **50%**, tetapi realisasi anggaran **0%**. Tidak adanya realisasi anggaran dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi atau aktivitas non-anggaran, atau terdapat kendala administrasi yang menghambat penyaluran anggaran.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran terlihat cukup tinggi di hampir semua program, ditandai dengan rendahnya realisasi anggaran, namun sebagian besar capaian kinerja tetap berada pada tingkat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan relatif efektif meskipun menggunakan sumber daya terbatas. Namun, beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya di bawah target perlu dievaluasi, terutama pada bidang pemberdayaan kelurahan, kegiatan pembinaan desa, serta koordinasi ketertiban umum. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas capaian kinerja dan pelayanan publik.

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7****Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja dan Anggaran(S2)**

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	3,760,959,558	3,605,009,208	34,89%	1,653,590,681	34,89 %	45.9%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29,868,300	18,900,450	37,50%	6,380,000	37,50%	33.8%
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,810,900	12,616,000	1 Dokumen	4,920,000	50 %	39.0%
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,778,100	1,663,650	- Dokumen	210,000	0 %	12.6%
I.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,054,900	1,221,400	1 Dokumen	420,000	50 %	34.4%
I.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	8,224,400	3,399,400	5 Dokumen	830,000	50 %	24.4%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,791,510,802	2,791,458,802	48,90 %	1,364,997,983	48,90 %	48.9%
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,766,550,802	2,766,498,802	23 Orang	1,352,517,983	50%	48.9%
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	24,960,000	24,960,000	1 Lapor an	12,480,000	33,33 %	50.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	25,494,500	23,982,100	50 %	11,400,000	50 %	47.5%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25,494,500	23,982,100	2 Laporan	11,400,000	50 %	47.5%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	49,903,750	24,043,250	35 %	9,275,500	35 %	38.6%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	19,838,750	14,876,250	6 Laporan	7,260,000	50 %	48.8%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	30,065,000	9,167,000	2 Orang	2,015,500	28,57%	22.0%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	417,531,190	303,606,190	50%	104,143,840	50 %	34.3%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	7,433,000	7,433,000	5 Paket	3,945,600	55 %	53.1%
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	2 paket	6,597,500	6,597,500	1 paket	997,500	50%	15.1%
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	9,531,040	9,531,040	2 Paket	1,050,140	40 %	11.0%
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	21,349,650	19,858,650	1 Paket	4,120,000	20 %	20.7%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	10,920,000	10,920,000	2 Dokumen	4,125,000	50 %	37.8%
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	164,700,000	138,450,000	6 Laporan	30,500,000	50 %	22.0%
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197,000,000	110,816,000	6 Laporan	59,405,600	50 %	53.6%
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	10,300,000	10,300,000	0	-	0	0.0%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	10,300,000	10,300,000	0	-	0	0.0%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	362,331,016	358,698,416	50 %	155,566,400	50 %	43.4%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27,732,100	24,099,500	6 Laporan	3,342,100	50 %	13.9%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	34,598,916	34,598,916	6 Laporan	8,224,300	50%	23.8%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	300,000,000	300,000,000	6 Laporan	144,000,000	50 %	48.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100 %	74,020,000	74,020,000	39,57 %	1,826,958	39,57 %	2.5%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	39,900,000	39,900,000	4 Unit	1,826,958	44,44 %	4.6%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	8,630,000	8,630,000	6 Unit	-	40 %	0.0%
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	20,000,000	20,000,000	1 Unit	-	50%	0.0%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	11 unit	5,490,000	5,490,000	1 Unit	-	9%	0.0%



Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” selama Triwulan II menunjukkan capaian yang cukup baik disertai dengan tingkat efisiensi anggaran yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar program dan subkegiatan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran yang lebih rendah dari pagu awal tanpa mengurangi esensi output yang direncanakan.

Secara keseluruhan, dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp3,76 miliar, dilakukan penyesuaian menjadi Rp3,60 miliar, dan realisasi hingga Triwulan II mencapai Rp1,65 miliar atau 45,9%. Hal ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif serta optimalisasi kebutuhan biaya sesuai kondisi riil pelaksanaan.

Efisiensi terlihat pada berbagai subkegiatan, khususnya pada penyusunan dokumen perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, serta pemeliharaan barang milik daerah. Banyak kegiatan dapat diselesaikan dengan pemanfaatan sumber daya internal, penyesuaian metode kerja, serta pengurangan belanja nonprioritas. Beberapa kegiatan administrasi umum, seperti penyediaan logistik kantor, barang cetakan, kunjungan tamu, dan rapat koordinasi, menunjukkan realisasi anggaran antara 11% hingga 53%, menandakan adanya penghematan dari penyederhanaan proses dan penggunaan fasilitas yang lebih efisien.

Pada subkegiatan pemeliharaan dan pengadaan barang, efisiensi mencapai tingkat yang sangat tinggi, terlihat dari rendahnya realisasi belanja karena penundaan atau penyesuaian kebutuhan barang yang belum mendesak. Sementara itu, kegiatan terkait gaji dan tunjangan ASN menunjukkan realisasi yang stabil dan terukur, sesuai jumlah ASN yang tetap.

Secara umum, efisiensi sumber daya pada Triwulan II tercapai melalui pengendalian belanja yang lebih selektif, pemanfaatan sumber daya internal,

serta fokus pada target prioritas. Pencapaian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah secara berkelanjutan pada triwulan berikutnya.

#### **G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja merupakan langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung keberhasilannya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan strategi, peningkatan efisiensi, dan penguatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang

##### **➤ Analisis Program yang Menunjang Sasaran 1**

#### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

##### **- Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

##### **- Indikator Sasaran Progra:**

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**- Target Kinerja : 100%**

**- Realisasi Kinerja : 50%**

##### **- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan Target Kinerja Indikator Program}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{50}{100} \times 100$
	=	<b>50%</b>

**- Capaian kinerja : 50%**

**- Predikat Kinerja : sedang**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

-

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### - Sasaran Program:

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

### - Indikator Sasaran Program:

Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- **Target Kinerja** : 100%

- **Realisasi Kinerja** : 62,5%

### - Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{(75+50)/2}{100} \times 100$
	=	<b>62,5 %</b>

- **Capaian kinerja** : 62,5%

- **Predikat Kinerja** : sedang

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan

## 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

### - Sasaran Program:

Meningkatnya Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### - Indikator Sasaran Program:

Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Target Kinerja :** 100%.
- **Realisasi Kinerja:** 50%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{((50 + 50) / 2)}{100} \times 100$
	=	<b>100%</b>

- **Capaian kinerja :** 50%.
- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

#### 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan

- **Target Kinerja :** 100%.
- **Realisasi Kinerja:** 50%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{50}{100} \times 100$
	=	<b>50%</b>

- **Capaian kinerja :** 50%.
- **Predikat Kinerja :** **Sedang.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

#### 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 37,50%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{37,50}{100} \times 100$
	=	<b>37,50%</b>

- **Capaian kinerja :** 37,50%.

- **Predikat Kinerja :** Sedang.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan analisis

#### ➤ Analisis Program yang Menunjang Sasaran 2

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- **Sasaran Program:**

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja :** 100%.
- **Realisasi Kinerja:** 34,89%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{((37,50 + 50 + 35 + 50 + 0 + 50 + 39,57) / 7)}{100} \times 100$
	=	<b>34,89%</b>

- **Capaian kinerja :** 34,89%.
- **Predikat Kinerja :** rendah.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui APBD adalah sebesar **Rp 3.943.251.208,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1,708,645,581,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **43.33%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12.**

Realisasi Anggaran Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,605,009,208	1,653,590,681	45.9%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,900,450	6,380,000	33.8%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,616,000	4,920,000	39.0%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,663,650	210,000	12.6%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,221,400	420,000	34.4%
I.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,399,400	830,000	24.4%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,791,458,802	1,364,997,983	48.9%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,766,498,802	1,352,517,983	48.9%
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24,960,000	12,480,000	50.0%
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23,982,100	11,400,000	47.5%
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23,982,100	11,400,000	47.5%
I.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,043,250	9,275,500	38.6%
I.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,876,250	7,260,000	48.8%
I.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	9,167,000	2,015,500	22.0%
I.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,606,190	104,143,840	34.3%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,433,000	3,945,600	53.1%
I.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6,597,500	997,500	15.1%
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,531,040	1,050,140	11.0%
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,858,650	4,120,000	20.7%
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,920,000	4,125,000	37.8%
I.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138,450,000	30,500,000	22.0%
I.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,816,000	59,405,600	53.6%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,300,000	-	0.0%
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,300,000	-	0.0%
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358,698,416	155,566,400	43.4%
I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,099,500	3,342,100	13.9%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	34,598,916	8,224,300	23.8%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000	144,000,000	48.0%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,020,000	1,826,958	2.5%
I.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan Gedung/kantor	39,900,000	1,826,958	4.6%
I.7.4	Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Gedung/kantor	8,630,000	-	0.0%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.754.850	1,393,700	29.3%
II.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.754.850	1,393,700	29.3%
II.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.754.850	1,393,700	29.3%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	279.571.950	44,073,050	15.8%
III.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.571.950	21,513,050	27.0%
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.030.050	15,263,050	95.2%
III.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.541.900	6,250,000	9.8%
III.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000	22,560,000	11.3%
III.2.1	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	200.000.000	22,560,000	11.3%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.080.850	2,215,850	16.9%
IV.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.525.400	1,775,400	18.6%



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
IV.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.774.900	1,124,900	16.6%
IV.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.750.500	650,500	23.7%
IV.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.555.450	440,450	12.4%
IV.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.555.450	440,450	12.4%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.623.000	7,372,300	22.6%
V.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.623.000	7,372,300	22.6%
V.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.623.000	7,372,300	22.6%
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.211.350	-	0.0%
VI.1.	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.211.350	-	0.0%
VI.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.787.150	-	0.0%
VI.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	5.424.200	-	0.0%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada Triwulan II Tahun 2025, Kecamatan Nuha telah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan capaian kinerja yang secara umum berada pada jalur yang positif, baik dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian strategi yang dilakukan sepanjang periode pelaporan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta beberapa hambatan teknis di lapangan. Tantangan ini menjadi evaluasi penting bagi perangkat kecamatan dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran pada triwulan berikutnya. Sinergi dan kolaborasi antarperangkat kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat semakin diperkuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II ini, Kecamatan Nuha berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi berkelanjutan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025. Melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, Kecamatan Nuha optimis dapat menghadirkan kinerja pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sorowako, Juli 2025

Camat Nuha,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.**

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA

### KECAMATAN NUHA

#### TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIYADI HAMID S,STP

Jabatan : CAMAT NUHA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Nuha, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

Pihak Pertama,

HARIYADI HAMID,S,STP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN NUHA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81,5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	66

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3,605,009,208,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.754.850,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Rp 279.571.950,-	APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.080.850,-	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.623.000,-	APBD
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.333.200,-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR



Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

CAMAT NUHA



HARIYADI HAMID,S,STP





Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tanggal 11 Juli 2025  
di Aula Kantor Camat Nuha





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**KECAMATAN NUHA**

Alamat : Jln. Diponegoro No. 02 Sorowako 92984  
Email : kcn.lutimkab@gmail.com

Sorowako, 10 Juli 2025

Nomor : 800.1/210.a/KCN  
Lampiran : -  
Hal : **Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Triwulan II**

Yth. 1. Sekertaris Camat  
2. Kepala Seksi/Kasubag Kec.Nuha  
3. Staf Kec.Nuha  
di\_ Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi  
Triwulan II Tahun 2025**, maka dengan ini kami mengundang  
Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

**Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2025**

**Pukul : 10.00 Wita-Selesai**

**Tempat : Aula Kantor Camat Nuha**

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan banyak  
terima kasih.

CAMAT NUHA,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si**

Pangkat: Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Luwu Timur di Malili.



